

IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SEBAGAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH INKLUSI (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA)

Alissa Khotrunada¹, Ima Widiyanah²

¹ Universitas Negeri Surabaya; alissa.21068@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; imawidiyanah@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
Pendidikan Karakter;
Sekolah Inklusi;
Implementasi Program.

Riwayat artikel:

Diterima 2025-06-27

Direvisi 2025-06-30

Diterima 2025-07-01

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai penguatan pendidikan karakter di sekolah inklusi, dengan studi kasus di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya nilai Rapor Pendidikan tahun 2024 terutama pada aspek karakter serta tantangan pembentukan karakter akibat keragaman karakter, dan kebutuhan khusus peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P5 dilakukan secara sistematis sesuai panduan pengembangan P5 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen, hingga evaluasi dan monitoring. Implementasi ini dipengaruhi oleh empat faktor utama menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut secara umum mendukung implementasi P5. Namun, keterbatasan akses internet menghambat optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, pengawasan guru masih kurang dan pemberdayaan ABK belum maksimal karena keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK). Dampak dari implementasi P5 adalah meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai karakter nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas di kehidupan siswa sehari-hari.

Penulis yang sesuai:

Alissa Khotrunada

Universitas Negeri Surabaya; alissa.21068@mhs.unesa.ac.id

1. PERKENALAN

Pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. Pada pendidikan di Indonesia, konsep kemerdekaan memainkan peran penting dalam memahami visi pendidikan yang ideal. Tokoh penting dalam dunia Pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, mengembangkan pendidikan yang ideal dengan fokus pada asas kemerdekaan (Nissa & Suastra, 2023).

Paulo Freire, seorang pendidik Brasil, juga menekankan pentingnya kebebasan peserta didik dalam proses pendidikan (Freire, 2020). Keduanya berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan sehingga peserta didik dapat secara utuh mengembangkan potensi dan menjadi manusia yang seutuhnya.

Melalui kurikulum peningkatan kompetensi, kemampuan bernalar ilmiah dan memahami bacaan menjadi tujuan untuk membantu siswa memahami dunia dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat (Unesco, 2021). Beberapa ahli berpendapat bahwa kurikulum adalah jantung pendidikan. Output pendidikan yang baik atau buruk sangat dipengaruhi oleh kurikulum itu sendiri, apakah mampu membangun kesadaran kritis pada peserta didik atau justru sebaliknya (Yuniarto et al., 2022). Kurikulum yang dirancang secara sistematis memiliki peran penting dalam pendidikan siswa. Jika dilihat dari perspektif masyarakat, budaya, dan sekolah sebagai lembaga sosial, kurikulum memegang tiga peran utama: sebagai penjaga nilai-nilai (konservatif), sebagai alat evaluasi dan refleksi (kritis atau evaluatif), dan sebagai pendorong inovasi (kreatif). Ketiga peran harus saling menyeimbangi karena pada dasarnya Pendidikan diimplementasikan dari kurikulum (Amarta et al., 2024).

Pengembangan kurikulum adalah upaya merencanakan kesempatan belajar yang bertujuan untuk mendorong peserta didik mencapai perubahan yang diinginkan. Prosesnya mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hasil evaluasi dari kurikulum yang sudah diterapkan akan menjadi acuan untuk perencanaan berikutnya, disesuaikan dengan perkembangan IPTEK, pandangan para ahli, serta dinamika era globalisasi. Pemerintah bersama dengan sekolah-sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melaksanakan pengembangan kurikulum (Sumampow, 2024).

Perubahan kurikulum diterapkan melalui serangkaian kebijakan yang didasarkan pada analisis mendalam, evaluasi, dan prediksi terhadap kebutuhan. Kebijakan ini juga mempertimbangkan berbagai tantangan yang muncul baik dari faktor internal seperti dinamika Pendidikan didalam sekolah maupun eksternal seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Prinsip utama yang mendasari perubahan kurikulum adalah fleksibilitas dan kesinambungan (Machali, 2014). Setiap negara pasti menghadapi kenyataan bahwa tidak ada kurikulum pendidikan yang bisa disusun sempurna dan berlaku selamanya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan bertujuan agar dapat menunjang kualitas pendidikan, serta bisa disebut sebagai bentuk usaha dalam memajukan mutu pendidikan. Meskipun kurikulum disusun dengan sangat baik, pada akhirnya perubahan atau perbaikan tetap diperlukan. Penting bagi pelaksana pendidikan untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan efektif agar pendidikan berjalan dengan baik dan efisien. Kurikulum mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa dalam pendidikan dan menentukan arah tujuan pendidikan nasional (Santika et al., 2022).

Dalam praktiknya, kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. Sejak tahun 1947, pembaruan kurikulum terjadi berturut-turut pada tahun 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, dan 1997 (revisi dari kurikulum tahun 1994), diikuti oleh tahun 2004 dan 2006 dengan diperkenalkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan Kurikulum 2013 kemudian direvisi pada tahun 2018 (Barlian & Iriantara, 2021). Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus yang mengatur tentang penggunaan kurikulum darurat. Kurikulum ini kemudian berkembang menjadi Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023. Pada tahap awal implementasinya, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga opsi kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebagai bagian dari konsep Merdeka Belajar (Santika et al., 2022).

Kurikulum Merdeka diterbitkan sebagai pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memberdayakan siswa dari segi akademis, pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga peka terhadap lingkungan sosial (Astuti & Putro, 2024). Salah satu struktur kurikulum kokulikuler adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program ini dirancang khusus untuk mengasah nilai-nilai Pancasila pada diri siswa dengan tujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia, mampu bernalar secara kritis, kreatif dalam menghadapi tantangan, mandiri dalam menyelesaikan masalah, serta terbuka untuk bekerja sama dalam keberagaman masyarakat (Purtina et al., 2024).

Pendidikan karakter di dunia pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan akhlak siswa yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih bersahabat. Sekolah pada jenjang pendidikan dasar memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Beberapa ahli berpendapat bahwa proporsi pendidikan karakter di jenjang dasar dapat mencapai lebih dari 60%, agar nilai-nilai tersebut dapat tumbuh dan berkembang seiring usia siswa (Saleh, 2022). dengan dikembangkannya pendidikan inklusi di Indonesia sejak awal tahun 2000, Lembaga Pendidikan inklusi memiliki beragam siswa dengan kondisi yang berbeda. Hal ini menjadi peran penting untuk menanamkan Pendidikan karakter sebagai wujud menghargai sesamanya. Tanpa penanaman karakter empati, berpotensi terjadi perundungan yang sudah banyak terjadi terutama terhadap siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Fatimah & Chamdani, 2023).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, SMP Negeri 1 Yogyakarta telah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka fase D sejak tahun 2022 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSKAP No. 034/H/KR/2022. Dalam satu tahun ajaran dilaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak 3 tema dari kelas 7 sampai kelas 9. Total 360 JP untuk kelas 7&8 sedangkan 320 JP untuk kelas 9. SMP Negeri 1 Yogyakarta juga merupakan sekolah inklusi yang mulai efektif dilaksanakan sejak tahun 2019 tetapi adanya guru pendamping khusus (GPK) dimulai tahun 2020. Pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat dua GPK dari total 20 siswa ABK diantaranya 6 siswa dari kelas 7, 8 siswa dari kelas 8, dan 6 siswa dari kelas 9. Sebagian besar ABK di sekolah ini adalah slow learner dan ada satu tuna grahita. Para peserta didik yang bersekolah di tempat ini juga mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda pada setiap individunya terutama pada karakternya.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024, aspek karakter siswa di SMP Negeri 1 Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan tetap berada dalam kategori "Baik". Aspek karakter yang dinilai dalam rapor ini mencakup dimensi penting seperti akhlak, gotong royong, kreativitas, cara berpikir kritis, dan kemandirian. Peningkatan skor pada indikator ini menjadi refleksi dari adanya upaya berkelanjutan dari pihak sekolah dalam memperkuat pendidikan karakter melalui berbagai strategi pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif namun juga afektif dan sosial. Salah satu program unggulan yang memainkan peran strategis dalam penguatan karakter siswa adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Tantangan penguatan karakter di sekolah ini juga tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Jogja Anti Bullying terhadap siswa kelas VII hingga IX. Survei tersebut menunjukkan bahwa praktik perundungan masih terjadi dalam berbagai bentuk, dengan bullying verbal dan cyberbullying sebagai jenis yang paling dominan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi P5 di SMP Negeri 1 Yogyakarta berkontribusi terhadap peningkatan karakter murid yang tercermin dalam Rapor Pendidikan tahun 2024, bagaimana penguatan karakter yang diberikan kepada setiap individu yang ditempa pada sekolah ini. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian dari program Kurikulum Merdeka yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang memfokuskan kepada penguatan karakter siswa di sekolah inklusi. Dengan mempertimbangkan latar belakang inklusif dan

keberhasilan peningkatan karakter siswa sebagaimana tercermin dalam Rapor Pendidikan 2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis terkait dengan penguatan karakter siswa melalui program P5 di sekolah menengah pertama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, dengan peneliti berperan sebagai *human instrument* dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2014). Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta yang merupakan sekolah inklusi dan telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022/2023. Pada tahun ajaran 2024/2025, sekolah ini melaksanakan P5 di seluruh jenjang kelas (7, 8, dan 9) dengan tema "Bhinneka Tunggal Ika", sehingga menjadikannya relevan untuk diteliti dalam konteks penguatan karakter di lingkungan inklusif.

Pengumpulan data dilakukan selama periode September hingga Desember 2024. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu oleh panduan wawancara dan dokumentasi. Panduan wawancara berisi pertanyaan terbuka yang disusun untuk menggali informasi secara mendalam dengan dukungan alat perekam guna menjamin keakuratan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, koordinator dan fasilitator P5, guru BK, guru pendamping khusus (GPK), serta sejumlah siswa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung seperti modul P5, portofolio siswa, jurnal guru, rapor P5, dan arsip kegiatan terkait pelaksanaan P5 di sekolah tersebut.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan (Miles, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Validitas hasil juga diperkuat dengan menerapkan empat kriteria keabsahan dari Lincoln dan Guba, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, & *confirmability*. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana implementasi P5 berjalan di sekolah inklusi, serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Dalam bagian ini, temuan dan diskusi dibahas sesuai dengan pekerjaan peneliti di lapangan dan dikaitkan dengan teori atau temuan penelitian sebelumnya. Beracuan pada fokus penelitian ini, temuan dan diskusi mencakup implementasi P5 sesuai pedoman P5 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi. Faktor keberhasilan diidentifikasi melalui teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Setyawan et al., 2021). Adapun temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut.

3.1 Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai bagian dari kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Yogyakarta dilaksanakan melalui proses yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, asesmen, monitoring dan evaluasi sesuai dengan (Panduan Pengembangan P5, 2024). Proses implementasi ini menunjukkan bahwa sekolah menjalankan

program sebagai kewajiban administratif serta berusaha menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan belajar siswa, sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang menetapkan P5 sebagai pembelajaran kokurikuler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1) Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta dilakukan secara sistematis dan kolaboratif sebagai langkah awal penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Langkah ini dilandasi oleh ketentuan dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa P5 merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran kokurikuler yang wajib diterapkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terpisah dari pembelajaran intrakurikuler.

a. Pembentukan Tim Pelaksana

Perencanaan diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana P5 oleh kepala sekolah. Tim ini terdiri dari unsur manajemen sekolah, koordinator proyek, serta guru-guru lintas mata pelajaran. Kepala sekolah berkoordinasi dengan Waka Kurikulum menunjuk koordinator proyek yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pembelajaran berbasis proyek. Tim ini bertugas menyusun perencanaan tema, modul proyek, jadwal kegiatan, strategi asesmen, dan pelaporan.

b. Penentuan Dimensi, Tema, dan Alokasi Waktu

Tim pelaksana menentukan 2–3 dimensi Profil Pelajar Pancasila yang relevan berdasarkan rapor pendidikan, visi sekolah, serta kebutuhan karakter peserta didik. Dimensi yang dipilih mencakup aspek seperti berkebinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, dan mandiri. Tema proyek kemudian dipilih dari tema sesuai panduan P5 Kemendikbudristek untuk jenjang SMP yang disesuaikan dengan event dan kondisi sekolah, misalnya bersama dengan momen HUT SMP Negeri 1 Yogyakarta, sekolah mengusung tema "Bhinneka Tunggal Ika" dengan bernuansa adat dan suku di Indonesia. Untuk pelaksanaannya, SMP Negeri 1 Yogyakarta menggunakan sistem blok, yakni pelaksanaan proyek dalam rentang waktu 2–3 minggu per tema, agar siswa dapat fokus tanpa terganggu oleh jadwal intrakurikuler lainnya. Alokasi waktu disesuaikan dengan ketentuan kurikulum, yaitu 360 JP untuk kelas VIII dan 320 JP untuk kelas IX.

c. Penyusunan Modul Proyek

Modul proyek disusun secara kontekstual dengan memperhatikan kesiapan siswa, potensi lokal, dan prinsip eksploratif. Modul mencakup tujuan pembelajaran berbasis sub-elemen Profil Pelajar Pancasila, alur aktivitas, strategi asesmen, media pembelajaran, dan rubrik capaian. Modul juga dilengkapi dengan LKPD dan panduan teknis untuk guru sebagai fasilitator. Strategi penyusunan modul mengikuti pendekatan backward design, dimulai dari penentuan tujuan, perencanaan asesmen, hingga pengembangan aktivitas yang mendorong eksplorasi, refleksi, dan aksi nyata. Modul disusun untuk menjamin keterlibatan aktif peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dengan modifikasi pada instruksi dan target yang sesuai kemampuan masing-masing.

d. Strategi Pelaporan

Hasil pelaksanaan P5 dirancang untuk dimasukkan dalam rapor proyek yang berbentuk deskriptif naratif, sesuai dengan panduan pelaporan Kemendikbudristek.

Rapor mencerminkan capaian karakter siswa dari dimensi yang dipilih serta mencatat proses perkembangan mereka secara holistik.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Indahsari & Nugroho, 2023) yang menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan inklusif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan P5. Dalam konteks sekolah inklusi, perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan siswa menjadi syarat utama agar pelaksanaan dapat berjalan adil dan partisipatif. Penelitian lain oleh (Yuniardi, 2023) juga menegaskan bahwa perencanaan yang baik tidak hanya ditandai oleh keterlibatan guru, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam memetakan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran secara fleksibel. Keduanya menyoroti pentingnya desain awal yang terstruktur agar pelaksanaan P5 tidak hanya berjalan administratif, tetapi berdampak langsung pada penguatan karakter siswa secara nyata, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti ABK.

2) Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta dirancang sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek lintas disiplin (*Project Based Learning / PjBL*) yang dianjurkan dalam Pedoman P5 Kemendikbudristek. Dalam proses ini, siswa dihadapkan pada situasi belajar yang menuntut keterlibatan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual melalui tahapan eksplorasi, elaborasi, refleksi, dan aksi nyata. SMP Negeri 1 Yogyakarta menerapkan sistem blok, yaitu pelaksanaan P5 dilakukan dalam waktu khusus (2–3 minggu per tema), agar siswa dapat fokus menyelesaikan proyek tanpa terdistraksi dengan kegiatan intrakurikuler. Setiap kelas menyelesaikan 2–3 tema per tahun ajaran sesuai alokasi waktu yang disesuaikan dengan jenjang kelas (360 JP untuk kelas VIII dan 320 JP untuk kelas IX), sebagaimana diatur dalam Panduan P5. Langkah-Langkah Pelaksanaan PjBL diantaranya: menentukan pertanyaan mendasar, mendesain dan menyusun jadwal proyek, memonitor keterlibatan siswa, serta mengevaluasi hasil dan pengalaman belajar. Selama pelaksanaan, guru selaku fasilitator mendampingi siswa secara langsung maupun tidak langsung.

Pada minggu 1 rangkaian kegiatan terdiri dari; pembukaan proyek oleh kepala sekolah, pemaparan materi kebudayaan oleh guru, pembentukan kelompok kecil eksplorasi budaya, pengumpulan dan pengolahan data budaya daerah, pembuatan infografis budaya secara berkelompok, penyusunan dan presentasi esai kebudayaan, perencanaan dan pembagian peran untuk pentas seni, latihan awal pentas seni di kelas. Sementara minggu 2 rangkaian kegiatan terdiri dari; outing class ke museum sonobudoyo, pembuatan atribut kampanye (poster, pamflet), merancang strategi pemasaran pasaran spedjita, latihan intensif pentas seni, pelaksanaan pasaran spedjita, pentas seni gelar pelajar, apresiasi antar kelompok, penulisan esai reflektif (kelas ix).

Dalam pelaksanaan P5, guru tidak berperan sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menyusun ide, menavigasi masalah, mengelola waktu, dan menyusun hasil karya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan Kemendikbudristek bahwa P5 menuntut peran guru yang fleksibel, terbuka, dan mampu mendampingi proses belajar yang beragam. Pada sekolah inklusi, guru juga perlu menerapkan prinsip diferensiasi dengan memberikan variasi cara pandang, proses,

dan produk berdasarkan kondisi siswa. Siswa berkebutuhan khusus (ABK) diberikan penyesuaian peran, instruksi yang disederhanakan, serta ruang partisipasi yang setara. Mereka tidak hanya dilibatkan secara simbolis, tetapi benar-benar didampingi dan diberdayakan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pelaksanaan ini menunjukkan keterlibatan yang kuat antar guru dan siswa. Proses ini mengasah keterampilan berpikir kritis, kerja sama tim, serta menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan kemandirian. Temuan ini didukung oleh (Ulandari & Rapita, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan P5 sangat dipengaruhi oleh keterlibatan guru sebagai fasilitator aktif danelibatan siswa dalam pengalaman belajar. Di sekolah inklusi, fleksibilitas peran guru menjadi sangat penting dalam menjamin inklusivitas pelaksanaan.

3) Asesmen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Asesmen dalam pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip autentik, berkelanjutan, kontekstual, dan inklusif, sebagaimana ditegaskan dalam Panduan P5 Kemendikbudristek. Asesmen ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir (produk), tetapi juga menilai proses belajar, keterlibatan siswa, serta transformasi nilai dan sikap yang mencerminkan dimensi Profil Pelajar Pancasila.

Asesmen pada pelaksanaan projek P5 mencakup tiga tahapan yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan refleksi. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui kesiapan dan pemahaman awal siswa. Asesmen formatif dilaksanakan selama kegiatan berlangsung melalui observasi keterlibatan, penilaian tugas, rubrik kinerja, dan peer-assessment. Guru menggunakan instrumen digital yaitu Google Form untuk merekam data keterlibatan siswa. Sementara asesmen reflektif dilakukan pada akhir projek melalui penulisan esai. Hasil asesmen tersebut kemudian dituangkan dalam rapor P5 dalam bentuk deskripsi naratif dan skor skala 1–4, yang mencerminkan ketercapaian dimensi karakter siswa berdasarkan pengamatan guru selama kegiatan berlangsung. Rapor ini menampilkan nilai akhir, catatan proses perkembangan siswa selama projek, termasuk aspek perkembangan karakter dan nilai-nilai pancasila.

Siswa ABK dinilai berdasarkan proses, keterlibatan, dan perkembangan sosial-emosional mereka selama kegiatan, bukan semata-mata pada produk akhir yang dihasilkan. Pendekatan ini dilakukan secara individual, dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan ritme belajar masing-masing siswa ABK. Penilaian disesuaikan dengan indikator keterlibatan aktif, seperti kehadiran, partisipasi dalam diskusi kelompok, kontribusi dalam kegiatan, serta upaya menyelesaikan tugas dengan dukungan guru pendamping khusus (GPK) atau fasilitator. Hal ini mencerminkan pendekatan asesmen yang inklusif, adil, dan humanistik karena tidak membandingkan hasil akhir siswa ABK dengan standar siswa reguler, namun menilai berdasarkan potensi dan proses. Asesmen ini merupakan pemantauan dan pengukuran pencapaian tujuan program serta identifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, asesmen yang berkelanjutan memberikan gambaran objektif terhadap ketercapaian karakter siswa secara prosesual dan membuka ruang evaluasi bagi guru dalam merancang penguatan karakter yang lebih tepat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tirtoni et al., 2024) yang menegaskan bahwa asesmen dalam P5 harus berbasis proses, bukan hanya produk, agar karakter siswa dapat

dinilai secara menyeluruh. Penilaian proses memungkinkan guru menangkap dinamika perkembangan sikap dan nilai yang dibentuk selama pelaksanaan proyek. Hal ini diperkuat oleh temuan (Adi et al., 2023) yang menyatakan bahwa asesmen karakter dalam P5 harus mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial secara bersamaan, serta melibatkan refleksi berkelanjutan baik dari guru maupun siswa.

4) Monitoring dan Evaluasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa implementasi program berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penguatan karakter yang telah dirumuskan dalam Panduan P5 Kemendikbudristek Edisi 2024. Proses ini dilakukan secara reflektif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, termasuk kepala sekolah, koordinator P5, guru fasilitator, siswa, dan bahkan orang tua. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala selama pelaksanaan proyek berlangsung. Kepala sekolah bersama tim koordinator P5 melakukan observasi langsung terhadap kegiatan proyek di dalam dan luar kelas, mencermati kehadiran, partisipasi, serta interaksi siswa selama proses belajar. Guru mencatat keterlibatan siswa dalam jurnal kegiatan dan dokumentasi digital sebagai bukti pelaksanaan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan yang bertujuan mendeteksi tantangan lapangan secara cepat dan memberi solusi secara kontekstual.

Setelah pelaksanaan proyek selesai, evaluasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan reflektif yang melibatkan guru dan siswa. Tim P5 dan guru-guru mengadakan rapat evaluasi untuk meninjau keberhasilan strategi yang telah digunakan, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun perbaikan untuk pelaksanaan tema selanjutnya. Dalam forum ini, guru mengevaluasi sejauh mana dimensi Profil Pelajar Pancasila telah tercermin dalam aktivitas dan respons siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun sosial.

Evaluasi juga melibatkan partisipasi aktif siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka selama proyek, baik melalui diskusi kelompok maupun pengisian survei. Di SMP Negeri 1 Yogyakarta, pendekatan reflektif dilakukan secara inklusif. Sekolah juga membuka ruang evaluatif bagi orang tua untuk memberi masukan. Masukan dari orang tua kemudian dihimpun sebagai bahan perbaikan program dan penguatan sinergi sekolah–keluarga. Dalam evaluasi juga teridentifikasi beberapa tantangan lapangan, seperti terbatasnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendampingi seluruh siswa ABK selama kegiatan luar kelas, kesenjangan pengawasan guru saat *outing class*, serta kendala teknis dalam dokumentasi kegiatan secara digital.

Pedoman P5 Kemendikbudristek secara tegas menyebut bahwa evaluasi merupakan ruang belajar kolektif bagi satuan pendidikan dalam menyempurnakan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dalam praktik yang dilakukan di SMP Negeri 1 Yogyakarta, dimana evaluasi digunakan sebagai titik balik untuk memperbaiki strategi, menguatkan pendekatan inklusif, serta menyesuaikan rancangan proyek dengan kondisi siswa dan budaya sekolah. Proses evaluasi ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian (Zulfatus, 2024), yang menekankan pentingnya forum refleksi guru sebagai mekanisme

utama dalam penyempurnaan implementasi P5. Proses evaluasi ini menunjukkan fungsi peninjauan ulang terhadap efektivitas kegiatan untuk perbaikan ke depan.

3.2 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai penguatan pendidikan karakter siswa di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, melainkan juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang mencakup empat faktor utama, diantaranya: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi implementasi kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan (Setyawan et al., 2021).

1) Komunikasi

Komunikasi yang baik menjadi dasar utama dari proses implementasi yang efektif. Di SMP Negeri 1 Yogyakarta, komunikasi antara kepala sekolah, koordinator P5, dan guru pelaksana dilakukan melalui grup WhatsApp, rapat pada saat menjelang dan setelah P5, dan pengarahan teknis sebelum kegiatan dimulai. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antarpihak untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang tujuan, prosedur, dan teknis pelaksanaan P5.

Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antar pelaksana berjalan aktif, beban kerja administratif dan padatnya kegiatan membuat koordinasi tidak selalu maksimal, terutama saat perencanaan detail teknis menjelang kegiatan. Situasi ini menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi menjadi aspek penting sebagaimana disampaikan oleh Edward III bahwa komunikasi yang tidak akurat atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi kebijakan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Y. Rahmawati, 2023) yang menyatakan bahwa kekaburan dalam instruksi teknis dan minimnya konsolidasi antar guru menyebabkan pelaksanaan proyek P5 di beberapa sekolah berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, komunikasi perlu dirancang secara informatif, komunikatif dan responsif terhadap tantangan lapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia di SMP Negeri 1 Yogyakarta mendukung secara cukup baik pelaksanaan P5, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana-prasarana. Guru dan kepala sekolah menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung penguatan karakter siswa melalui pendekatan berbasis proyek. Sarana seperti proyektor, ruang kelas, dan perangkat IT tersedia dan dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Dukungan dana dari BOS dan BOSDA serta keterlibatan orang tua secara sukarela turut memperkuat sisi pembiayaan pelaksanaan proyek.

Selain itu, sekolah menyediakan ruang khusus di Unit Layanan Bimbingan Konseling (BK) sebagai tempat pembelajaran alternatif bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang mengalami kesulitan berkonsentrasi di kelas reguler. Ruangan ini dilengkapi dengan media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan ABK. Di ruang ini, ABK didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan pendekatan individual dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Terdapat pula dukungan dari pihak eksternal, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta (Disdikpora), yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan, seperti penyediaan

tenda, panggung, dan perlengkapan acara puncak Gelar Pelajar. Kehadiran Kabid SMP serta dukungan moral dari alumni turut memperkuat semangat dan motivasi siswa.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi, seperti koneksi Wifi yang tidak stabil, terbatasnya jumlah GPK dibandingkan jumlah ABK, serta kurang optimalnya keterlibatan guru dalam mendampingi siswa secara menyeluruh saat kegiatan berlangsung. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya peran serta ABK dalam proyek P5. Penelitian oleh (A. Rahmawati et al., 2020) menegaskan bahwa tersedianya ruang dan tenaga pendamping khusus merupakan prasyarat penting dalam menjamin pelaksanaan pendidikan karakter secara inklusif. Hal ini diperkuat oleh temuan (Redana & Suprpta, 2023), yang menyatakan bahwa tidak semua guru memiliki komitmen yang sama dalam mengimplementasikan program karakter. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan atau penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan agar mereka dapat berperan optimal sebagai implementator kebijakan, khususnya dalam konteks sekolah inklusi. Temuan-temuan ini sejalan dengan teori Edward III yang menekankan pentingnya sumber daya sebagai faktor krusial dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan di lapangan (Sururi et al., 2023).

3) Sikap Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan P5, dengan antusiasme tinggi. Guru menjalankan peran sebagai fasilitator P5 dengan mendampingi berbagai aktivitas siswa, seperti latihan pentas seni, penyusunan karya kelompok, dan presentasi hasil proyek. Pelaksanaan peran ini dijalankan secara penuh oleh sebagian guru dengan antusias, karena melihat dampak positif yang ditunjukkan siswa, seperti peningkatan keberanian tampil, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta kreativitas dalam mengekspresikan gagasan.

Namun, sikap ini tidak seragam di semua guru. Masih terdapat guru yang belum memberikan arahan secara jelas, atau tidak aktif dalam mendampingi kelompok saat proyek berlangsung. P5 memerlukan biaya dan energi yang tidak sedikit. Guru harus siap dengan beban kerja yang bertambah, akan tetapi hal ini, jika guru sudah berkomitmen untuk implementasi P5 maka hal ini tidak menjadi keluhan. Hal ini berdampak pada ketimpangan pendampingan dan hasil proyek antar kelas. Menurut Edward III, sikap pelaksana yang mendukung akan memperkuat proses implementasi. Sebaliknya, sikap yang pasif atau tidak sejalan dapat menghambat keberhasilan program (Sururi et al., 2023). Pelaksanaan P5 akan efektif jika guru memposisikan diri tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendamping dan pembimbing karakter secara konsisten.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta telah dirancang dan dijalankan secara sistematis dan terorganisir. Struktur ini membentuk kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari level manajerial hingga teknis. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama kebijakan, yang memastikan pelaksanaan program sejalan dengan arah kebijakan kurikulum merdeka dan nilai-nilai pendidikan karakter. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menjalankan peran sebagai ketua pelaksana, mengkoordinasikan seluruh unsur teknis pelaksanaan proyek, termasuk menyusun jadwal kegiatan, memfasilitasi distribusi modul ajar, dan mengkoordinasikan fasilitator. Sementara itu, koordinator P5 bertugas sebagai pengarah teknis, yang menjadi

penghubung langsung antara tim perencana, fasilitator, dan guru pendukung. Peran guru sebagai fasilitator dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran yang telah diblok khusus untuk P5, sehingga tidak tumpang tindih dengan pelajaran reguler.

Setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya berkat sosialisasi awal berupa rapat koordinasi, pembagian modul, dan dokumen teknis seperti LKPD dan jadwal kegiatan. Modul pelaksanaan P5 yang memuat rincian waktu, tema, output, serta panduan asesmen dijadikan sebagai acuan bersama. Selama proses pelaksanaan, guru tetap dapat berkonsultasi dengan koordinator P5 atau tim manajemen sekolah jika terdapat dinamika yang membutuhkan penyesuaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi ini berjalan tanpa hambatan yang berarti. Tidak ditemukan tumpang tindih kewenangan atau ambiguitas peran antar pelaksana. Mekanisme kerja yang terstruktur membuat koordinasi antarpihak berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam perspektif teori Edward III (Setyawan et al., 2021), struktur birokrasi yang demikian mencerminkan keberhasilan dalam aspek desain organisasi implementasi. Struktur yang fungsional tidak hanya mengatur distribusi peran, tetapi juga menyediakan jalur komunikasi dan kontrol yang jelas.

3.3 Dampak yang dihasilkan dari implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Yogyakarta

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta memberikan dampak yang nyata terhadap dinamika pembelajaran dan perkembangan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proyek ini mendorong perubahan perilaku, pola interaksi sosial, dan semangat belajar siswa, sekaligus membuka ruang aktualisasi diri yang selama ini kurang difasilitasi oleh pembelajaran reguler. Implementasi P5 menunjukkan kontribusi signifikan dalam penguatan karakter siswa, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2018. Lima nilai utama yang ditekankan dalam Permendikbud tersebut diantaranya; religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang tercermin dalam aktivitas proyek. Melalui kegiatan eksplorasi budaya, kampanye nilai-nilai Pancasila, dan presentasi kelompok, siswa belajar mengenali nilai-nilai tersebut secara kognitif dan menginternalisasinya melalui tindakan nyata. Misalnya, nilai gotong royong berkembang melalui kolaborasi dalam membuat karya kelompok, menampilkan pentas seni, hingga menyiapkan kegiatan Pasaran Spedjita. Kemandirian terlihat dalam kemampuan siswa menyelesaikan tugas proyek secara bertanggung jawab, sementara keberanian berbicara di depan umum dan menerima perbedaan pandangan menguatkan nilai toleransi dan sikap nasionalisme.

Sebagai sekolah inklusi, SMP Negeri 1 Yogyakarta memiliki populasi siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang dilibatkan secara aktif dalam P5. Peran yang diberikan kepada siswa ABK, seperti menjadi operator presentasi, mendokumentasikan kegiatan, hingga tampil di pentas seni, menunjukkan bahwa pelaksanaan P5 mampu membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Interaksi yang terjalin antara siswa reguler dan siswa ABK dalam kelompok menunjukkan bahwa P5 mendorong tumbuhnya empati, solidaritas, dan kesetaraan sosial. Selain karakter dan interaksi sosial, P5 juga berdampak pada aspek kognitif dan kreativitas siswa. Pembuatan karya seperti infografis, esai budaya, poster kampanye, hingga presentasi publik mengasah kemampuan berpikir kritis, menulis argumentatif, dan menyampaikan gagasan secara sistematis. Pengalaman outing class dan observasi langsung di Museum Sonobudoyo memperkaya wawasan siswa melalui pendekatan

pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Hal ini sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada aspek kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian (Safitri et al., 2022) yang menyebutkan bahwa proyek berbasis budaya dalam P5 secara efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ekspresi kreatif siswa, khususnya pada jenjang SMP.

Meskipun secara umum P5 menunjukkan dampak positif, ditemukan beberapa dinamika yang perlu mendapat perhatian. Pertama, beban kegiatan yang padat menyebabkan beberapa siswa merasa kewalahan ketika tugas harus dikumpulkan di hari yang sama. Siswa yang memiliki kegiatan di luar sekolah seperti les atau kegiatan keluarga mengalami kesulitan mengatur waktu dan menunjukkan kelelahan fisik maupun emosional. Kedua, meskipun sikap siswa menunjukkan peningkatan, masih terdapat sebagian kecil siswa yang menunjukkan perilaku tidak tertib, seperti berbicara kotor atau tidak serius dalam upacara. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter adalah proses jangka panjang yang tidak dapat selesai dalam satu tema proyek saja. Namun, kedua tantangan tersebut bukan menjadi bukti kegagalan, melainkan bagian dari dinamika implementasi yang harus dijadikan bahan refleksi dan penyempurnaan ke depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP Negeri 1 Yogyakarta cukup berhasil dalam memupuk pendidikan karakter dengan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

4. 1 Implementasi P5 sebagai Penguatan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Yogyakarta berjalan secara sistematis dan berpedoman pada panduan P5 dari kemendikbudristek. Empat tahapan diantaranya: perencanaan, pelaksanaan, asesmen, serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan dijalankan secara kolaboratif oleh tim pelaksana yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kurikulum, koordinator P5, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus (GPK). Modul disusun dalam format digital yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks sekolah inklusi. Pelaksanaan proyek dilakukan dalam jangka waktu 2-3 minggu per tema dengan aktivitas pembelajaran berbasis proyek yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk mendampingi proses eksplorasi, produksi, dan presentasi. Asesmen dilaksanakan secara menyeluruh (diagnostik, formatif, reflektif) termasuk asesmen individual berbasis proses untuk siswa ABK. Evaluasi dilakukan melalui forum refleksi guru dan hasilnya digunakan untuk perbaikan pelaksanaan di kegiatan P5 berikutnya. Agar implementasi semakin optimal, sekolah perlu mengembangkan mekanisme perencanaan yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan siswa ABK sejak awal, memperluas pelibatan GPK dalam penyusunan modul, dan mengatur waktu pelaksanaan proyek agar tidak berbenturan dengan kegiatan akademik lainnya. Selain itu, pelatihan fasilitasi proyek berbasis inklusi perlu diberikan secara berkala kepada guru.
4. 2 Empat faktor kunci mempengaruhi keberhasilan implementasi P5 di sekolah ini sesuai teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi internal terjalin aktif melalui koordinasi rutin dan WAG, namun masih terkendala Waktu dalam berkoordinasi. Sumber daya manusia dan sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan program, meskipun akses internet masih terbatas dan jumlah GPK belum proporsional dengan jumlah siswa ABK. Sikap guru dalam mendampingi siswa tergolong

positif, meski belum merata dari segi intensitas keterlibatan. Struktur birokrasi sekolah berjalan fungsional dengan pembagian tugas yang jelas dan mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan P5. Sekolah perlu memperkuat komunikasi teknis antar pelaksana dengan pembagian tugas yang lebih merata, dan memaksimalkan peran GPK sebagai penghubung antara program P5 dan kebutuhan siswa ABK. Penambahan GPK dan peningkatan infrastruktur yaitu koneksi Wifi juga perlu menjadi prioritas. Untuk mengurangi beban kerja guru, penting dilakukan manajemen waktu yang lebih efektif serta penguatan kolaborasi antar guru.

- 4.3 P5 memberikan dampak positif terhadap penguatan karakter siswa, baik reguler maupun ABK. Siswa menunjukkan perkembangan pada dimensi gotong royong, kemandirian, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi. Siswa ABK merasa lebih diterima secara sosial sementara siswa reguler menunjukkan peningkatan empati dan solidaritas. Peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai karakter tidak hanya pada saat P5 namun dalam praktik sehari-hari. Namun, masih ditemukan tantangan seperti kelelahan siswa akibat beban kegiatan yang padat dan belum tertibnya perilaku sebagian siswa dalam mengikuti kegiatan. Penting bagi sekolah untuk menyesuaikan beban kegiatan P5 dengan kapasitas dan kondisi siswa, misalnya dengan mengatur jadwal pengerjaan tugas yang lebih fleksibel dan tidak menumpuk. Guru perlu memberikan penguatan karakter secara konsisten melalui keteladanan dan pendampingan. Selain itu, refleksi guru dan siswa sebaiknya digunakan secara maksimal untuk menyusun perbaikan konten, pendekatan, dan pelaksanaan P5 yang lebih efektif.

REFERENSI

- Adi, N., Sulastri, S., Syahril, S., Ermita, E., & Febrianti, S. (2023). Penyusunan Asesmen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pada Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Tanah Datar. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(3), 327–333.
- Amarta, M., Lestari, A., Cahyani, I., & Mustafiyanti, M. (2024). Peranan Dan Fungsi Kurikulum Secara Umum Dan Khusus. *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(1), 82–89.
- Astuti, A. W., & Putro, A. A. Y. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan P5 Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 10(1), 355–366.
- Barlian, U. C., & Iriantara, Y. (2021). Penerapan Kurikulum 2013 Revisi Di Masa Pandemi Pada Smk Ibs Tathmainul Quluub Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(01), 118–126.
- Fatimah, S., & Chamdani, M. (2023). The P5 And Ppra Model In Inclusive Schools. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 247–257.
- Freire, P. (2020). Pedagogy Of The Oppressed. In *Toward A Sociology Of Education* (Pp. 374–386). Routledge.
- Indahsari, R., & Nugroho, A. (2023). Implementation Of The Independent Curriculum At Al-Azhar Islamic Elementary School 16 Cilacap. *Proceeding Internasional Conference On Child Education*, 1(1), 337–347.
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.

- Nissa, I. C., & Suastra, I. W. (2023). Kurikulum Merdeka Dari Berbagai Perspektif Filsafat Pendidikan Dan Filosofi Ki Hajar Dewantara. *Empiricism Journal*, 4(2), 456–463.
- Panduan Pengembangan P5, Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran (2024).
- Purtina, A., Zannah, F., & Syarif, A. (2024). Inovasi Pendidikan Melalui P5: Memperkuat Karakter Siswa Dalam Kurikulum Merdeka. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 19(2), 147–152.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 1(1), 218–231.
- Rahmawati, Y. (2023). Efektifitas Penggunaan E-Modul Berbasis Project Based Learning Terhadap Kompetensi Peserta Didik Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 293–300.
- Redana, D. N., & Suprpta, I. N. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sma Negeri 4 Singaraja. *Locus*, 15(1), 77–87.
- Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7076–7086.
- Saleh, M. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Inklusi. *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, 17(2), 101–108.
- Santika, I. G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, I. W. (2022). Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide. *Jurnal Education And Development*, 10(3), 694–700.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward Iii Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (10th Ed.). Cv. Alfabeta.
- Sumampow, Z. F. (2024). *Pengembangan Kurikulum*. Selat Media.
- Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Implementasi Kebijakan Edwards Iii*. Indonesia Emas Group.
- Tirtoni, F., Amaliyah, R. I., Pinasti, T., Mubarakah, R., Putri, D. N. S., & Rosalinda, M. (2024). Implementation Of Child-Friendly Schools In The Success Of Character Programs In The Independent Curriculum In Muhammadiyah 1 Krian Elementary Schools. *Procedia Of Social Science And Humanities: International Conference Psychology And Education Transformation For Bright Future*, 6.
- Ulandari, S., & Rapita, D. D. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Memperkuat Karakter Peserta Didik. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 116–132.
- Unesco, P. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract For Education*. Educational And Cultural Organization Of The United Nations Paris, France.
- Yuniardi, A. (2023). Implementasi P5 Dengan Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Kedisiplinan Peserta Didik Pada Pkbm. *Proceeding Umsurabaya*.

Yuniarto, B., Maryanto, M., & Habibi, A. (2022). Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(11), 1170–1178.

Zulfatus, A. (2024). *Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Di Sd Negeri 1 Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara*. Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .